Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index:php/konmaspi

Strategi Diplomasi Aceh terhadap Utsmaniyah dalam Surat Sultan Alauddin Tahun 1566

Rhevana Rahma Anggraini
UIN Sunan Ampel Surabaya
rhevanarahma@gmail.com
Imam Ibnu Hajar
UIN Sunan Ampel Surabaya
ibnuhajar@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas strategi diplomasi Kesultanan Aceh Darussalam terhadap Kesultanan Utsmaniyah berdasarkan surat Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar kepada Sultan Süleyman al-Qanuni pada Januari 1566. Penelitian ini bertujuan menganalisis substansi surat dan mengidentifikasi strategi diplomasi yang tercermin dalam penyampaian permohonan Sultan Alauddin. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utama berupa teks surat beserta terjemahannya, yang dianalisis dengan memperhatikan konteks politik dan persaingan Aceh dengan Portugis di kawasan Samudra Hindia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi diplomasi Sultan Alauddin dibangun melalui empat cara yang saling berkaitan. Pertama, penggunaan bahasa penghormatan dan solidaritas keagamaan untuk membingkai hubungan dengan Sultan Utsmaniyah. Kedua, penyampaian laporan mengenai serangan Portugis terhadap kapal Muslim untuk memperkuat alasan permohonan bantuan. Ketiga, perumusan permintaan militer dan teknis secara spesifik, termasuk persenjataan, pasukan, dan tenaga ahli, sehingga kebutuhan pertahanan Aceh disampaikan secara konkret. Keempat, permohonan perlindungan bagi utusan dan kemudahan akses terhadap perlengkapan perang untuk memperkuat hubungan diplomatik lintas kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa diplomasi Aceh tidak hanya mengandalkan solidaritas keagamaan, tetapi juga memadukan argumentasi ancaman, perincian kebutuhan pertahanan, dan permohonan perlindungan politik. Strategi tersebut dapat diidentifikasi dari struktur dan isi surat, sedangkan realisasi seluruh permohonan memerlukan pembuktian melalui sumber sejarah lainnya.

Kata Kunci: Aceh Darussalam, diplomasi, Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar, Kesultanan Utsmaniyah, Portugis.

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Kesultanan Utsmaniyah pada abad XVI tidak terlepas dari dinamika persaingan politik dan perdagangan di kawasan Selat Malaka dan Samudra Hindia. Penguasaan Malaka oleh

Portugis pada 1511 M mengubah konstelasi kekuatan politik di kawasan tersebut sekaligus meningkatkan persaingan dalam penguasaan jalur perdagangan maritim. Letak Selat Malaka yang menghubungkan Asia Tenggara dengan India dan Timur Tengah menjadikan kawasan ini memiliki arti strategis bagi kepentingan ekonomi dan politik berbagai kekuatan regional. Dalam konteks tersebut, Kesultanan Aceh berupaya memperkuat kedudukan politiknya serta mempertahankan kepentingan perdagangan di tengah meningkatnya pengaruh Portugis (Batubara, 2020).

Upaya tersebut tercermin dalam kebijakan diplomasi Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar melalui hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah. Hubungan kedua kesultanan tidak hanya dilandasi oleh kedekatan keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik, keamanan, dan perdagangan. Salah satu sumber sejarah yang merekam hubungan tersebut ialah surat Sultan Alauddin yang ditujukan kepada Sultan Süleyman al-Qanuni pada Januari 1566. Surat tersebut memuat permohonan bantuan militer dan perlengkapan perang serta uraian mengenai ancaman Portugis terhadap kepentingan Aceh dan pelayaran kaum Muslim. Isi surat ini memberikan dasar untuk menelaah bagaimana Sultan Alauddin mengartikulasikan kepentingan politik Kesultanan Aceh melalui komunikasi diplomatik dengan penguasa Utsmaniyah (Rozali, 2014; Kadı & Peacock, 2020).

Surat diplomatik tersebut memiliki nilai penting sebagai sumber untuk mengkaji strategi diplomasi Aceh pada abad XVI. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan substansi permohonan yang disampaikan, tetapi juga dengan cara Sultan Alauddin membangun argumentasi diplomatik melalui penggunaan bahasa penghormatan, penekanan terhadap solidaritas keislaman, penyampaian ancaman Portugis, serta permintaan bantuan militer dan perlindungan hubungan diplomatik. Unsur-unsur tersebut dapat dianalisis untuk memahami cara kepentingan Aceh dirumuskan dan disampaikan kepada Utsmaniyah. Adapun ungkapan yang menunjukkan hubungan perlindungan antara kedua kesultanan perlu ditafsirkan berdasarkan konteks diplomatik pada masanya. Ungkapan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Aceh berada di bawah administrasi politik Utsmaniyah.

Kajian terdahulu mengenai hubungan Aceh dan Utsmaniyah telah membahas berbagai aspek, antara lain hubungan politik, kerja sama militer, perdagangan, dan solidaritas keagamaan. Meskipun demikian, pembahasan mengenai hubungan kedua kesultanan secara umum perlu dibedakan dari kajian yang secara khusus menempatkan

redaksi surat Sultan Alauddin sebagai dasar analisis strategi diplomasi. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada substansi surat serta makna diplomatik yang tercermin dalam bahasa dan permohonan yang disampaikan. Dengan fokus tersebut, strategi diplomasi Aceh dianalisis berdasarkan isi sumber sejarah, bukan semata-mata melalui uraian umum mengenai hubungan Aceh dan Utsmaniyah (Haykal, 2022; Kadı & Peacock, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi substansi surat Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar kepada Kesultanan Utsmaniyah pada Januari 1566 serta menganalisis strategi diplomasi Aceh yang tercermin dalam redaksi dan permohonan surat tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah diplomasi Islam dengan menunjukkan bagaimana komunikasi tertulis digunakan untuk menyampaikan kepentingan politik, militer, dan perdagangan dalam hubungan antarkesultanan pada abad XVI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengkaji strategi diplomasi Kesultanan Aceh Darussalam terhadap Kesultanan Utsmaniyah berdasarkan surat Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar yang ditujukan kepada Sultan Süleyman al-Qanuni pada Januari 1566. Metode sejarah dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Penerapan metode ini bertujuan menelaah isi surat berdasarkan sumber sejarah serta menjelaskan makna diplomatik yang tercermin dalam redaksi dan permohonan di dalamnya.

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu pengumpulan sumber yang berkaitan dengan surat diplomatik Sultan Alauddin dan hubungan Aceh–Utsmaniyah pada abad XVI. Sumber utama penelitian berupa dokumen surat beserta transkripsi atau terjemahannya yang diterbitkan dalam kajian mengenai hubungan Utsmaniyah dengan Asia Tenggara, khususnya karya Kadı dan Peacock (2020). Sumber pendukung berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu digunakan untuk menjelaskan konteks politik Aceh, persaingan dengan Portugis, serta hubungan diplomatik kedua kesultanan. Kajian Rozali (2014) juga digunakan untuk memahami hubungan Aceh–Utsmaniyah berdasarkan Bustan al-Salatin.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan dengan menelaah identitas, asal-usul, bentuk, bahasa, serta

informasi mengenai penyimpanan dan penerbitan dokumen yang digunakan. Kritik intern dilakukan dengan mengkaji isi surat, memperhatikan konteks penyusunannya, serta membandingkan informasinya dengan sumber sejarah lain yang relevan. Tahapan ini diperlukan untuk menilai keterandalan informasi dalam surat, terutama mengenai ancaman Portugis, permohonan bantuan militer, dan hubungan politik Aceh dengan Utsmaniyah (Kadı & Peacock, 2020).

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu menafsirkan informasi yang telah melalui proses kritik sumber. Analisis difokuskan pada redaksi surat yang menunjukkan strategi diplomasi Aceh, meliputi penggunaan bahasa penghormatan dan solidaritas keislaman, penyampaian ancaman Portugis sebagai alasan permohonan bantuan, permintaan persenjataan dan tenaga ahli, serta upaya memperoleh perlindungan politik dan kelancaran hubungan diplomatik. Informasi tersebut dihubungkan dengan konteks persaingan politik dan perdagangan di kawasan Selat Malaka dan Samudra Hindia. Penafsiran dilakukan dengan membedakan antara permohonan yang tercantum dalam surat dan bukti mengenai pelaksanaan atau respons atas permohonan tersebut.

Tahap keempat adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk artikel sejarah yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil pengumpulan, kritik, dan interpretasi sumber disusun secara sistematis untuk menjelaskan substansi surat Sultan Alauddin serta strategi diplomasi yang tercermin di dalamnya. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan dari sumber yang dianalisis dengan tetap memperhatikan keterbatasan bukti sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Politik Diplomasi Aceh–Utsmaniyah

Hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Kesultanan Utsmaniyah pada abad XVI berkembang dalam konteks persaingan politik, ekonomi, dan militer di kawasan Selat Malaka dan Samudra Hindia. Penaklukan Malaka oleh Portugis pada 1511 M membawa perubahan terhadap konfigurasi kekuasaan regional, terutama karena Malaka sebelumnya merupakan pelabuhan penting yang menghubungkan jaringan perdagangan dari India, Arab, Persia, dan berbagai wilayah Nusantara. Penguasaan Portugis atas pelabuhan tersebut turut memengaruhi aktivitas perdagangan dan memperkuat persaingan antarkekuatan politik di kawasan. Dalam situasi tersebut, Kesultanan Aceh Darussalam berupaya mempertahankan kepentingan perdagangan

sekaligus memperkuat kedudukannya sebagai kekuatan politik dan maritim di kawasan Selat Malaka (Reid, 2010; Putra & Muhsin, 2022).

Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar, kebijakan politik Aceh diarahkan pada penguatan kekuasaan dan perluasan pengaruh di wilayah Sumatra serta kawasan sekitarnya. Upaya tersebut berlangsung di tengah persaingan dengan sejumlah kekuatan regional, termasuk Kerajaan Aru dan Kesultanan Johor. Persaingan dengan kedua kerajaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan wilayah, tetapi juga menyangkut kepentingan politik dan ekonomi di Sumatra Timur. Aru memiliki posisi strategis karena berhubungan dengan jalur perdagangan dan perluasan pengaruh politik di kawasan tersebut. Sementara itu, hubungan Johor dengan Portugis menambah kompleksitas persaingan yang dihadapi Aceh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri Sultan Alauddin al-Qahhar berkaitan erat dengan upaya memperkuat kedudukan Aceh, mengamankan wilayah strategis, dan membatasi pengaruh Portugis di kawasan Selat Malaka (Putra & Muhsin, 2022).

Di tengah dinamika tersebut, hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah memiliki arti strategis bagi kepentingan politik dan pertahanan Aceh. Hubungan kedua kesultanan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan jaringan perdagangan di Samudra Hindia serta persaingan dengan Portugis yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di Malaka. Bagi Aceh, hubungan diplomatik dengan Utsmaniyah membuka peluang untuk memperoleh dukungan dari kekuatan Islam yang memiliki kemampuan militer dan jaringan politik lintas kawasan. Sementara itu, kepentingan Utsmaniyah terhadap jalur perdagangan Samudra Hindia dan Laut Merah turut menjadi konteks yang relevan dalam memahami hubungan tersebut (Reid, 2010). Dengan demikian, hubungan Aceh–Utsmaniyah tidak semata-mata didasarkan pada kesamaan agama, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis yang berkembang dalam persaingan politik dan ekonomi pada abad XVI.

Hubungan diplomatik tersebut tercermin melalui pengiriman utusan Aceh ke Istanbul serta penyampaian permohonan bantuan kepada Sultan Süleyman al-Qanuni. Surat Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar yang bertanggal Januari 1566 menjadi sumber penting untuk menelaah hubungan kedua kesultanan pada masa tersebut. Surat itu memperlihatkan adanya komunikasi diplomatik yang berkaitan dengan ancaman Portugis dan kebutuhan Aceh untuk memperkuat pertahanannya. Permohonan yang disampaikan menunjukkan bahwa diplomasi digunakan sebagai sarana untuk

memperoleh dukungan dalam menghadapi persoalan keamanan dan mempertahankan kepentingan politik Aceh. Meskipun demikian, isi surat perlu dibedakan dari bukti mengenai pelaksanaan setiap permohonan, sehingga permintaan bantuan tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh bantuan tersebut telah diberikan (Hakim et al., 2024; Kadı & Peacock, 2020).

Konteks politik diplomasi Aceh–Utsmaniyah terbentuk melalui pertemuan antara persaingan regional, kepentingan perdagangan, kebutuhan pertahanan, dan hubungan antarkesultanan Islam. Kebijakan Sultan Alauddin al-Qahhar dalam menghadapi Portugis memperlihatkan pentingnya hubungan luar negeri bagi upaya mempertahankan kedudukan Aceh di kawasan Selat Malaka. Dalam kerangka tersebut, surat diplomatik Januari 1566 tidak hanya merepresentasikan komunikasi antara dua penguasa, tetapi juga menjadi sumber untuk memahami bagaimana kepentingan politik dan keamanan Aceh disampaikan melalui jalur diplomasi. Konteks ini menjadi landasan untuk menganalisis substansi surat serta strategi diplomasi yang digunakan Sultan Alauddin al-Qahhar dalam menjalin hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah.

Substansi Surat Sultan Alauddin Tahun 1566

Surat Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar kepada Sultan Süleyman al-Qanuni pada Januari 1566 merupakan sumber sejarah yang merekam kepentingan politik dan diplomatik Kesultanan Aceh Darussalam dalam hubungannya dengan Kesultanan Utsmaniyah. Isi surat tidak terbatas pada permohonan bantuan untuk menghadapi Portugis, tetapi juga memuat gambaran mengenai komunitas Muslim di kawasan Samudra Hindia, ancaman terhadap pelayaran dan perdagangan, kebutuhan pertahanan Aceh, serta harapan terhadap perlindungan politik dari penguasa Utsmaniyah. Bagian pembuka surat menggunakan ungkapan penghormatan dan keagamaan, sedangkan bagian berikutnya menjelaskan persoalan yang dihadapi Aceh beserta berbagai permohonan yang diajukan kepada Sultan Süleyman. Berdasarkan substansi tersebut, isi surat dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama, yaitu penghormatan dan hubungan keagamaan, ancaman Portugis terhadap keamanan pelayaran, kebutuhan bantuan militer dan teknis, serta perlindungan politik dan hubungan diplomatik (Kadı & Peacock, 2020).

Pertama, penghormatan kepada Sultan Süleyman dan gambaran komunitas Muslim di Samudra Hindia. Pada bagian awal surat, Sultan Alauddin menempatkan Sultan Süleyman sebagai penguasa yang memiliki kedudukan tinggi dan diharapkan

menjadi tempat memperoleh perlindungan. Ungkapan yang menggambarkan istana Utsmaniyah sebagai tempat bersandar dan menyampaikan keluhan menunjukkan penggunaan bahasa penghormatan dalam komunikasi antarpenguasa. Sultan Alauddin juga menggambarkan dirinya dan rakyatnya sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan. Selain itu, surat tersebut memuat keterangan mengenai komunitas Muslim di sejumlah wilayah, termasuk Ceylon dan Kalikut, keberadaan masjid, serta penyebutan nama Sultan Utsmaniyah dalam khutbah. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa Sultan Alauddin menghubungkan hubungan antara Aceh dan Utsmaniyah dengan gambaran solidaritas keagamaan yang lebih luas. Secara historis, penyebutan komunitas Muslim tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari cara Sultan Alauddin menjelaskan pentingnya hubungan dengan Utsmaniyah. Namun, keterangan mengenai jumlah penduduk, pulau, dan praktik keagamaan dalam surat tetap perlu dipahami sebagai informasi yang disampaikan oleh pengirim, bukan sebagai gambaran yang secara otomatis mewakili seluruh kondisi masyarakat di kawasan tersebut (Kadı & Peacock, 2020; Hakim et al., 2024).

Kedua, ancaman Portugis terhadap keamanan pelayaran dan perdagangan Muslim. Bagian penting lainnya berisi laporan Sultan Alauddin mengenai serangan Portugis terhadap kapal-kapal Muslim yang melintasi jalur perdagangan dan perjalanan menuju Mekah. Surat tersebut menggambarkan adanya kapal yang ditangkap maupun diserang menggunakan meriam. Sultan Alauddin juga menceritakan penyerangan terhadap sebuah kapal yang membawa komoditas perdagangan, seperti lada, sutra, kayu manis, cengkih, dan kapur barus. Dalam keterangannya, kapal tersebut membawa sekitar lima ratus orang Muslim, dengan sebagian penumpang disebut menjadi tawanan. Selain menggambarkan kerugian yang dialami kapal dan penumpangnya, laporan tersebut menghubungkan aktivitas Portugis dengan terganggunya mobilitas pedagang dan umat Islam di kawasan Samudra Hindia. Makna historis bagian ini terletak pada keterkaitan antara keamanan pelayaran, kepentingan perdagangan, dan perjalanan keagamaan. Bagi Aceh, ancaman terhadap jalur laut tidak hanya menyangkut keselamatan kapal, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan jaringan perdagangan dan hubungan antarkawasan. Meskipun demikian, rincian mengenai peristiwa penyerangan tersebut perlu diperlakukan sebagai laporan dalam surat dan dibandingkan dengan sumber lain apabila hendak digunakan untuk memastikan skala serta dampak peristiwanya (Kadı & Peacock, 2020).

Ketiga, permohonan bantuan militer dan tenaga ahli. Sultan Alauddin secara khusus mengajukan permohonan bantuan berupa pasukan berpengalaman, persenjataan, meriam, kuda, serta tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam pembuatan senjata, pembangunan benteng, dan pembuatan kapal. Surat tersebut menyebut beberapa jenis meriam, yaitu bacaluşka, havayî, dan şayka. Sultan Alauddin juga menyampaikan bahwa delapan ahli meriam yang sebelumnya dikirim oleh pihak Utsmaniyah telah tiba di Aceh. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa permohonan yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan penambahan perlengkapan perang, tetapi juga dengan pengembangan kemampuan teknis pertahanan. Tenaga ahli diharapkan dapat membantu meningkatkan keterampilan dalam penggunaan artileri dan pembangunan sarana militer. Dengan demikian, kebutuhan pertahanan Aceh dalam surat tersebut mencakup persenjataan sekaligus pengetahuan teknis yang diperlukan untuk menghadapi ancaman Portugis. Akan tetapi, penyebutan delapan ahli meriam dan permintaan tambahan tenaga ahli perlu dibedakan dari bukti mengenai keseluruhan bantuan yang benar-benar diterima Aceh. Isi surat secara langsung menunjukkan kebutuhan dan harapan Sultan Alauddin, sedangkan pelaksanaan setiap permohonan memerlukan dukungan sumber sejarah lainnya (Kadı & Peacock, 2020; Hakim et al., 2024).

Keempat, permohonan perlindungan politik dan penguatan hubungan diplomatik. Surat Sultan Alauddin juga memuat permintaan agar Aceh memperoleh hubungan perlindungan yang lebih erat dengan Utsmaniyah. Hal ini tampak dalam ungkapan yang menempatkan Aceh sebagai bagian dari lingkungan pengabdian dan perlindungan Sultan Süleyman. Bahasa tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menegaskan kedekatan hubungan politik dengan penguasa Utsmaniyah. Namun, ungkapan tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa Aceh secara administratif berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Selain persoalan kedudukan politik, Sultan Alauddin meminta agar utusan Aceh memperoleh perlakuan baik dan jaminan keamanan ketika melintasi wilayah seperti Mesir, Yaman, Jeddah, dan Aden. Ia juga mengharapkan kemudahan dalam memperoleh kuda, tembaga, senjata, dan perlengkapan perang dari wilayah-wilayah tersebut. Surat itu turut menyinggung peranan Lütfi, utusan Utsmaniyah yang pernah datang ke Aceh, serta Abdurrahman bin Karamanlıoğlu yang disebut membantu perjalanan Lütfi dan rombongannya. Permintaan agar Lütfi dikirim kembali dan Abdurrahman memperoleh penghargaan menunjukkan bahwa surat tersebut juga membicarakan keberlanjutan hubungan antarpihak yang terlibat dalam komunikasi

diplomatik. Secara keseluruhan, bagian ini memperlihatkan bahwa hubungan Aceh–Utsmaniyah mencakup perlindungan utusan, akses terhadap jaringan perdagangan, dan hubungan personal antarpelaksana diplomasi, bukan hanya komunikasi antara kedua sultan (Kadı & Peacock, 2020).

Berdasarkan keempat kelompok tersebut, substansi surat Sultan Alauddin tahun 1566 memperlihatkan keterkaitan antara kepentingan keagamaan, keamanan maritim, kebutuhan militer, dan hubungan politik. Penghormatan kepada Sultan Süleyman serta gambaran komunitas Muslim memberikan konteks keagamaan bagi hubungan kedua kesultanan, sedangkan laporan mengenai Portugis menjelaskan ancaman yang menjadi latar permohonan bantuan. Permintaan persenjataan dan tenaga ahli menunjukkan kebutuhan pertahanan Aceh, sementara permohonan perlindungan utusan dan kemudahan memperoleh perlengkapan perang memperlihatkan pentingnya jaringan diplomatik lintas kawasan. Dengan demikian, surat tersebut dapat dibaca sebagai dokumen yang merekam berbagai persoalan dan kepentingan Aceh dalam hubungannya dengan Utsmaniyah. Penafsiran terhadap isinya tetap perlu membedakan antara keterangan yang disampaikan Sultan Alauddin, permohonan yang diajukan, dan tindakan yang dapat dibuktikan melalui sumber sejarah lainnya. Pembedaan ini penting agar substansi surat tidak langsung disamakan dengan keseluruhan realisasi hubungan politik dan bantuan militer antara kedua kesultanan.

Strategi Diplomasi Aceh Darussalam dengan Kesultanan Utsmaniyah

Strategi diplomasi Kesultanan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-16 berkembang dalam konteks persaingan politik, ekonomi, dan militer di kawasan Samudra Hindia dan Selat Malaka. Hubungan tersebut tidak hanya dilandasi kepentingan politik, tetapi juga kesamaan identitas keagamaan sebagai kerajaan Islam. Kesamaan tersebut menjadi salah satu landasan bagi Aceh dalam membangun hubungan dengan Utsmaniyah sekaligus memperoleh dukungan untuk menghadapi ancaman Portugis. Kehadiran Portugis di Malaka sejak 1511 tidak hanya mengganggu kepentingan perdagangan Aceh, tetapi juga memengaruhi hubungan antarkerajaan Islam di kawasan Samudra Hindia. Dalam konteks tersebut, Aceh berupaya menghubungkan kepentingan politiknya dengan jaringan dunia Islam yang lebih luas. Solidaritas sesama kerajaan Islam kemudian menjadi salah satu unsur penting dalam hubungan diplomatik Aceh dan Utsmaniyah (Hakim et al., 2024)

Identitas Islam tersebut kemudian diwujudkan melalui kerja sama dalam bidang politik, militer, dan keagamaan. Aceh meminta dukungan Utsmaniyah berupa persenjataan, tenaga ahli, dan bantuan pertahanan sebagai bagian dari upaya menghadapi Portugis. Diplomasi tersebut juga berkaitan dengan kepentingan perdagangan dan pelayaran Muslim di kawasan Samudra Hindia. Dengan demikian, identitas Islam tidak hanya berfungsi sebagai simbol hubungan persaudaraan, tetapi juga menjadi landasan untuk memperkuat kerja sama politik dan militer kedua kerajaan (Haykal. 2022) Jejak hubungan tersebut juga dapat dilihat dari keberadaan kompleks makam di Gampong Bitai yang secara tradisi dikaitkan dengan komunitas Turki dan tokoh seperti Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi.

Kerja sama Aceh dan Utsmaniyah selanjutnya berkembang dalam bentuk bantuan militer. Meningkatnya ancaman Portugis terhadap Aceh dan perdagangan di Selat Malaka mendorong Aceh mengirim utusan ke Istanbul untuk memperoleh persenjataan, tenaga ahli, serta pengetahuan mengenai teknologi dan pertahanan militer. Bantuan Utsmaniyah berlangsung dalam beberapa tahap. Pada 1538-1539 M, Sultan Suleyman al-Qanuni dikabarkan mengirim sekitar 300 pasukan Turki untuk mendukung Aceh dalam menghadapi Portugis beserta sekutunya. Setelah misi diplomatik Aceh pada 1547 M, bantuan yang lebih besar juga direncanakan, meskipun pelaksanaannya mengalami hambatan akibat pemberontakan di Yaman. Dukungan yang lebih jelas terlihat pada 1567 M ketika Sultan Selim II memerintahkan Kurtoglu Hizir Reis untuk mempersiapkan ekspedisi menuju Aceh. Bantuan tersebut mencakup kapal, artileri, persenjataan, pasukan, serta tenaga ahli seperti pembuat senjata, tukang kayu, dan tukang besi. Dukungan Utsmaniyah tidak terbatas pada bantuan militer, tetapi juga meliputi keahlian dan teknologi di bidang pertahanan.

Dalam bidang politik dan maritim, hubungan Aceh dengan Utsmaniyah juga merupakan bagian dari strategi Aceh untuk memperkuat kedudukannya di kawasan Selat Malaka. Setelah Malaka dikuasai Portugis pada 1511, Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahhar menjalin hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah untuk memperkuat posisi Aceh, terutama dalam menghadapi Portugis serta memperluas jaringan politik dan perdagangan. Utsmaniyah memiliki kekuatan politik dan militer yang besar serta kepentingan terhadap jalur perdagangan Samudra Hindia, sedangkan Aceh memiliki posisi strategis di Selat Malaka. Hubungan kedua kerajaan dengan demikian tidak hanya

berkaitan dengan bantuan militer, tetapi juga menyangkut kepentingan keamanan, perdagangan, dan penguatan posisi politik masing-masing kerajaan.

Hubungan tersebut diwujudkan melalui pengiriman utusan Aceh ke Istanbul. Diplomasi menjadi sarana bagi Aceh untuk menyampaikan kepentingannya sekaligus membangun hubungan yang lebih erat dengan Utsmaniyah. Kerja sama kemudian mencakup pertukaran utusan, bantuan persenjataan, serta pengiriman tenaga ahli. Dalam bidang maritim, Aceh berupaya meningkatkan kemampuan armada dan persenjataannya. Pengiriman utusan ke Istanbul untuk memperoleh meriam menunjukkan bahwa hubungan diplomatik tersebut berkaitan erat dengan usaha memperkuat pertahanan Aceh di kawasan Selat Malaka. Hubungan diplomatik juga menggunakan bahasa penghormatan melalui ungkapan pujian, doa, dan persaudaraan sesama kerajaan Islam untuk membangun kedekatan antara kedua penguasa (Soviani & Sumanti 2025)

Selain kepentingan politik dan militer, hubungan Aceh dan Utsmaniyah juga memiliki dimensi ekonomi dan perdagangan. Letak Aceh yang strategis di Selat Malaka menjadikannya salah satu pusat perdagangan penting, terutama dalam perdagangan lada dan rempah-rempah. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar, jaringan perdagangan Aceh semakin berkembang hingga kawasan Timur Tengah melalui jalur Laut Merah. Catatan Portugis menyebutkan bahwa pada 1564 kapal-kapal Aceh membawa lada dalam jumlah besar ke Jeddah. Keterhubungan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan Aceh tidak hanya berlangsung di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan perdagangan internasional. Banda Aceh berkembang sebagai pelabuhan yang didatangi pedagang dari berbagai wilayah, termasuk India, Cina, dan Arab, sehingga menjadi salah satu pusat perdagangan yang bersifat multietnis (Reid, 2011)

Jalur Laut Merah menjadi penghubung penting antara Aceh dan kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, hubungan dengan Utsmaniyah memiliki nilai strategis bagi Aceh dalam mempertahankan jaringan perdagangan sekaligus menghadapi dominasi Portugis. Komoditas seperti lada, emas, dan rempah-rempah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi Aceh. Pengelolaan perdagangan kemudian semakin diperkuat pada masa Sultan Iskandar Muda. Perdagangan lada dipusatkan dan diawasi melalui Banda Aceh, sementara beberapa syahbandar bertugas mengatur aktivitas pelabuhan. Aceh juga memperluas pengaruhnya ke wilayah penghasil komoditas seperti Indrapura, Pariaman, Barus, Natal, dan Pasaman yang menghasilkan lada, emas, kemenyan, dan kapur barus (Muhzinat. 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap isi surat Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar kepada Sultan Süleyman al-Qanuni pada Januari 1566, dapat disimpulkan bahwa diplomasi Aceh terhadap Kesultanan Utsmaniyah dilakukan melalui beberapa strategi yang tercermin secara langsung dalam teks surat. Pertama, penggunaan bahasa penghormatan dan solidaritas keagamaan, sebagaimana terlihat dalam pujian kepada Sultan Süleyman serta penyebutan komunitas Muslim di kawasan Samudra Hindia. Kedua, penyampaian ancaman Portugis sebagai dasar permohonan bantuan, melalui laporan mengenai serangan terhadap kapal Muslim, gangguan perdagangan, dan ancaman terhadap perjalanan menuju Mekah. Ketiga, pengajuan permintaan bantuan militer dan keahlian teknis secara konkret, meliputi pasukan, meriam, kuda, serta tenaga ahli persenjataan, pembangunan benteng, dan pembuatan kapal. Keempat, permohonan perlindungan politik dan fasilitasi hubungan lintas kawasan, yang ditunjukkan melalui permintaan keamanan bagi utusan Aceh serta kemudahan memperoleh perlengkapan perang di wilayah yang berada dalam jaringan kekuasaan Utsmaniyah.

Keempat strategi tersebut menunjukkan bahwa surat Sultan Alauddin tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antarpenguasa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyampaikan kepentingan politik, keamanan, dan perdagangan Aceh kepada Utsmaniyah. Penggunaan argumentasi keagamaan berjalan berdampingan dengan penyampaian ancaman yang dihadapi dan perincian kebutuhan pertahanan. Sementara itu, permohonan perlindungan bagi utusan memperlihatkan pentingnya akses diplomatik dalam membangun hubungan antarkawasan. Meskipun demikian, kesimpulan mengenai strategi tersebut didasarkan pada isi dan bentuk permohonan dalam surat, bukan pada asumsi bahwa seluruh permintaan telah dipenuhi. Ungkapan Sultan Alauddin mengenai kedudukan Aceh di bawah perlindungan Utsmaniyah juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Aceh merupakan bagian administratif dari kesultanan tersebut. Dengan demikian, surat tahun 1566 memperlihatkan upaya Sultan Alauddin memanfaatkan bahasa keagamaan, argumentasi keamanan, permintaan bantuan konkret, dan hubungan perlindungan politik untuk memperjuangkan kepentingan Kesultanan Aceh Darussalam dalam menghadapi tekanan Portugis.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar. (1566, 7 Januari). Surat kepada Sultan Süleyman al-Qanuni [Terjemahan resmi bahasa Turki Utsmani, Dokumen E-8009]. Topkapı Palace Museum Archives, Istanbul, Turki.

Jurnal

Batubara, Taslim. 2020. "Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar: Sang Penakluk dari Kesultanan Aceh Darussalam." 1(1).

Hakim, L., Murodi, & Rahman, A. (2024). The Ottoman response.

Hartono, H. (2023). DIPLOMASI ACEH DAN TURKI UTSMANI: KERJA SAMA DAKWAH ISLAM DALAM BINGKAI PERDAGANGAN ABAD XVI-XIX MASEHI. *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, *19*(2), 159–166. https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v19i2.19253

Haykal, M. (2022). The Ottoman Turkish Expedition and the Anti-Colonialism Movement of the Sultanate of Aceh Darussalam 1530-1568. *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, *3*(2), 39–54. https://doi.org/10.24042/jhcc.v3i2.14563

Muhzinat, Z. (2021). Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, *5*(2), 73. https://doi.org/10.29300/ttjksi.v5i2.3719

Putra, J. S., & Muhsin, I. (2023). Kontribusi Kesultanan Aceh Darussalam terhadap Kemajuan Kemaritiman dan Perdagangan di Nusantara Abad XVI-XVII M. *Thaqafiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 48–64. https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104

Rozali. (2014). Aceh-Ottoman Relation in Bustan al-Salatin. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n29p93

Soviani, A., & Sumanti, S. T. (2025). Diplomasi Kerjasama Turki Utsmani dengan Aceh Darussalam pada Abad ke-16 Masehi: Tinjauan Historis dalam Perspektif Hubungan Internasional Islam. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *4*(3), 101–108. https://doi.org/10.57251/hij.v4i3.2027

Buku

Graf, A., Schröter, S., Wieringa, E. P., & Institute of Southeast Asian Studies (Eds.). (2010). Aceh: History, politics, and culture. Institute of Southeast Asian Studies.

Kadı, I. H., & Peacock, A. C. S. (2020). *Ottoman-Southeast Asian Relations (2 vols.): Sources from the Ottoman Archives*. BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004409996

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.